

ORASI ILMIAH MENTERI INVESTASI DI ITS SURABAYA

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kiri) didampingi Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard C Adkerson (kanan) menyampaikan materi saat Orasi Ilmiah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/10). Orasi Ilmiah itu bertema Transformasi Ekonomi melalui Hilarisasi dengan Kearifan Lokal.



DJP Kantongi Rp126 Miliar dari Pajak Kripto Dalam Waktu 3 Bulan

DJP juga telah memungut pajak dari *peer to peer lending* atau pinjaman online (pinjol) dengan total Rp107,25 miliar dalam jangka waktu yang sama. Pajak tersebut berasal dari PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT Rp74,44 miliar. Lalu, Rp32,81 miliar dari PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN dan BUT.

JAKARTA (IM) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak dari aset kripto sebesar Rp126,75 miliar. Pajak kripto tersebut terdiri

dari PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan penyetoran sendiri Rp60,76 miliar dan PPN Rp65,99 miliar. Direktur Jenderal Pajak

Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, jumlah tersebut merupakan pajak yang ditarik selama tiga bulan, atau yang dimulai dari Juni hingga Agustus.

"Pemajakan atas aset kripto PPh 22, sama, bulan Juni mulai. Berarti bulan ketiga Juni, Juli, Agustus kita dapat Rp125 miliar. PPh 22 Rp60 miliar, ini yang tarifnya 0,5% kemudian untuk PPN-nya Rp65 miliar," kata Suryo di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Selasa (4/10).

Selain pajak kripto, DJP juga telah memungut pajak dari *peer to peer lending* atau pinjaman online (pinjol) dengan total Rp107,25 miliar dalam jangka waktu yang sama. Pajak tersebut berasal dari PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT Rp74,44 miliar. Lalu, Rp32,81 miliar dari PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN dan BUT.

"Pemajakan P2P *lending*, dari beberapa bulan ini mulai lapor Juni, Juli, Agustus berarti 3 bulan kita dapat PPh 23 Rp74 miliar, kemudian PPh

pasal 26 Rp32 miliar," ujarnya.

Suryo Utomo juga menjelaskan tentang wajib pajak terkait harta yang telah direpatiasi. Menurutnya setiap bulan pemerintah menerima data dari perbankan yang nantinya dapat dibandingkan dengan laporan dari wajib pajak tersebut.

Namun untuk nilai yang telah direpatiasi, ia baru akan mengetahui nilainya setelah menerima laporan baik dari wajib pajak maupun bank penerima dana milik wajib pajak, sekitar satu bulan setelah batas akhir repatriasi harta peserta PPS.

"Kami mengingatkan wajib pajak yang melaporkan mau repatriasi dengan batas 30 September 2022 untuk segera melapor. Karena kami mesti cari data perbandingan dari perbankan yang menerima repatriasinya dia," ucapnya.

Sementara Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Aim Nursalim Saleh menyebut sebanyak 2.422 wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela

(PPS) akan merepatiasi dana mereka di luar negeri.

"Akhir 30 September 2022 ini batas akhir penyampaian repatriasi wajib pajak. Kami sudah mendata terdapat sebanyak 2.422 wajib pajak yang mencon-treng untuk mengikuti repatriasi," kata Aim dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP Jakarta, Selasa, seperti dilansir dari Antara.

Ia menyebut telah mengirim email blast untuk mengingatkan wajib pajak tersebut agar segera mengirimkan bukti telah merepatiasi harta di luar negeri berupa bukti terima di bank dalam negeri.

Berdasarkan data DJP, terdapat harta di luar negeri senilai Rp60,07 triliun yang dilaporkan dalam PPS yang dijalankan mulai Januari sampai akhir Juni 2022 lalu.

Wajib pajak yang belum melakukan repatriasi harta di luar negeri sampai waktu yang ditentukan diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • **hen**

PTBA Terapkan Digitalisasi Pertambangan

PALEMBANG (IM) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menerapkan digitalisasi dalam mengoperasikan dan memantau kegiatan pertambangan di berbagai lokasi di Sumatera Selatan, Lampung dan Sumatera Barat.

Corporate Secretary PTBA Apollonius Andwie mengatakan, digitalisasi sudah dilakukan perusahaan sejak 2020 untuk memantau aktivitas pertambangan secara "real time" (terkini) menggunakan beragam aplikasi.

Aplikasi yang digunakan perusahaan, yakni CISEA (Corporate Information System and Enterprise Application) yang mengintegrasikan beberapa sistem sekaligus, yaitu "Automation & SCADA System Integration" dan "Bukit Asam Mine Dispatch Optimization System".

Selanjutnya, "Automatic Train Loading Station", "Slope Stability Radar" (SSR), Digital Telemetri, Sistem Pemantauan Air Terintegrasi (SPARING), hingga "Corporate Social Responsibility" (CSR). "Transformasi digital merupakan bagian dari langkah PTBA untuk menjalankan 'Good Mining Practice'," kata Apollonius dalam keterangan seperti dilansir Antara, Selasa (4/10).

Penggunaan teknologi digital ini telah meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan usaha. Dengan terintegrasinya SCADA dalam platform CISEA, jarak tempuh tidak menjadi masalah untuk melakukan software "maintenance", "trouble shooting" dan analisis terhadap sistem kendali di PTBA.

Analisis data juga menjadi lebih mudah dan akurat karena semua data operasional disimpan secara otomatis dan "real time". Melalui "Bukit Asam Mine Dispatch Optimization System", produktivitas dan efisiensi pertambangan dapat ditingkatkan.

Data produksi, "real time performance unit" dan operator, "losstime", konsumsi BBM, monitoring posisi unit (loader, hauler, ancillaries), status unit, "real time" perkiraan kondisi jalur tambang, "safety operational", "water monitoring", "rain monitoring", semuanya dapat diperoleh dari

aplikasi yang tersedia telepon seluler.

Melalui program "Automatic Train Loading Station", pengisian dan penimbangan batu bara ke gerbong kereta api dilakukan secara otomatis dan bisa dipantau dengan ponsel. "Waktu proses pengisian batu bara ke gerbong kereta lebih cepat," kata dia.

Dengan begitu, konservasi sumber daya batu bara dapat ditingkatkan dan biaya atas risiko terjadinya longsor dapat diminimalkan.

Sedangkan program SSR memantau lereng tambang secara "real time" dan detail. SSR mampu mendeteksi pergerakan kecil yang tidak terdeteksi oleh alat monitoring lainnya. Dengan begitu, konservasi sumber daya batu bara dapat ditingkatkan. Biaya atas risiko terjadinya longsor diminimalkan.

Ada juga Digital Telemetri yang menyediakan data curah hujan secara "real time" melalui CISEA. Kemudian SPARING memberi peringatan dini bila terjadi penyimpangan kualitas air yang tidak sesuai baku mutu.

Apollonius menambahkan, aplikasi CISEA membantu penyaluran CSR agar lebih tepat sasaran dengan menyediakan data kelompok rentan hasil "social mapping", mempercepat evaluasi pemberian bantuan, dan memberikan data perbandingan ketepatan penyaluran dana CSR.

PTBA telah mendapatkan pengakuan Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk aplikasi CISEA dengan jangka waktu perlindungan 50 tahun sejak diumumkan. Sejumlah penghargaan diterima PTBA berkat capaian transformasi operasional digital.

Vice President Information Technology PTBA, Satria Wirawan pada 2021 mendapat penghargaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo karena inovasinya dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pertambangan.

Selain itu, Satria juga memperoleh penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral dari Kementerian ESDM pada 2020. • **hen**

Freeport Tambah Investasi Rp284 T

JAKARTA (IM) - Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoran Richard C Adkerson mengungkapkan rencana PT Freeport Indonesia (PTFI) menambah investasi hingga 2041. Investasi yang digelontorkan adalah US\$18,6 miliar atau Rp284,58 triliun (kurs Rp15.300), termasuk pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.

"Dalam 20 tahun ke depan kita berencana menggelontorkan hampir US\$20 miliar, yang mana US\$3 miliar untuk pembangunan smelter di Gresik," kata Adkerson, dikutip dari kanal *YouTube* Kementerian Investasi/BKPM.

Adkerson menjelaskan, sejak 1992 hingga 2021 Indonesia mendapatkan keuntungan sekitar US\$23,1 miliar (Rp353,43 triliun). Angka ini didapat dari pa-

jak, royalti, dividen, biaya dan pembayaran lain.

Terkait investasi hingga 2041 estimasi untung yang dicapai Indonesia mencapai US\$80 miliar atau Rp1.224 triliun. Dengan catatan harga tembaga berada di kisaran US\$4 per pound dan harga emas US\$1,800 per ounce.

"Ke depan dengan kondisi pasar yang positif, saya pikir dalam 20 tahun ke depan (2041) Indonesia ada keuntungan tidak langsung US\$ 80 miliar untuk Indonesia," katanya.

Dijelaskan Adkerson, hasil kesepakatan PTFI dengan pemerintah Indonesia, Indonesia akan mendapat untung hingga dari operasional tambang perusahaan.

"Pemerintah Indonesia dapat 70% keuntungan langsung dari operasional ini, 70% dari pajak dan lain-

nya. Jumlah itu lebih tinggi dari negara lainnya di dunia. Kalau ada yang bilang dapatnya nggak banyak, cek aja fakta ini, kasih tau mereka," ungkapnya.

PTFI juga menggelontorkan US\$1,9 miliar selama 1992-2021 untuk investasi sosial. Rinciannya adalah pendidikan 30%, budaya, olahraga, sosial 10%, hubungan pemangku kepentingan 18%, infrastruktur 11%, ekonomi 12%, kesehatan 20%, dan lainnya 1%.

Sedangkan sejak 2021 hingga 2041, PTFI menggelontorkan US\$100 juta per tahun untuk investasi sosial. Rinciannya adalah pendidikan 29,61%, kesehatan 19,73%, hubungan pemangku kepentingan 15,81%, ekonomi 12,54%, infrastruktur 11,39%, budaya, olahraga, dan sosial 9,72%, dan lainnya 1,21%. • **pan**



NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS

Petugas menunjukkan uang pecahan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (4/10). Nilai tukar rupiah kembali menembus level Rp15.300 pada perdagangan Selasa (4/10) siang, dimana sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah adalah mulai melandainya nilai dolar AS.



PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

Pemerintah Tambah Kuota BBM Jenis Pertalite dan Solar Subsidi

JAKARTA (IM) - Pemerintah menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar subsidi yang berlaku sejak 1 Oktober 2022 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

Penambahan kuota pertalite sebanyak 6,86 juta kiloliter (KL) dari kuota awal 23,05 juta KL, sedangkan untuk BBM solar subsidi ditambah 2,73 juta KL dari kuota awal tahun 2022 sebanyak 15,1 juta KL.

"Dengan kondisi perekonomian yang membaik pasca COVID-19, konsumsi BBM baik solar maupun pertalite mengalami lonjakan, sehingga jika tidak ditambah, kuotanya akan habis pada pertengahan Oktober 2022 untuk pertalite, dan pada pertengahan November untuk solar," kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Erika Retnowati dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (4/10).

Meskipun telah ada penambahan kuota, lanjutnya, sosialisasi penggunaan BBM subsidi tetap sasaran tetap harus ditekankan.

Dia meminta golongan yang mampu menggunakan BBM non subsidi karena

BBM subsidi hanya diberikan kepada yang berhak. "Selain itu juga membuat kinerja mesin mobil lebih baik (jika menggunakan BBM non subsidi)," ucapnya.

Penambahan kuota BBM jenis pertalite dan solar subsidi disambut positif oleh PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sebagai Badan Usaha yang ditugaskan untuk mendistribusikan BBM subsidi. Hal tersebut memberikan kepastian ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak.

"Hal ini tentu saja menjadi berita yang baik untuk masyarakat, tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan pertalite dan solar, penambahannya diharapkan akan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sampai akhir tahun," ungkap Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.

Sebagai informasi, sampai tanggal 30 September 2022 (*unverified*), realisasi solar subsidi sudah mencapai 85,81 persen atau sebesar 12,96 juta KL dari kuota 15,10 juta KL. Adapun pertalite sebanyak 95,32 persen atau sebesar 21,97 juta KL dari kuota 23,05 juta KL. • **dot**

PMI Manufaktur Sebesar 53,7 pada September 2022

JAKARTA (IM) - Peningkatan produksi dan ekspansi permintaan domestik baru mendorong naiknya Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia di bulan September 2022. PMI Manufaktur di bulan tersebut tercatat sebesar 53,7, atau naik dari 51,7 di bulan Agustus lalu. Hasil survei S&P Global menunjukkan bahwa tingkat ekspansi sektor manufaktur Indonesia di periode ini merupakan yang tercepat dalam delapan bulan dan solid secara keseluruhan.

Di tingkat ASEAN, Indonesia juga menunjukkan perbaikan yang paling kuat pada kesehatan sektor manufaktur, seiring dengan kondisi manufaktur yang membaik di seluruh wilayah regional tersebut. PMI Manufaktur Indonesia pada September 2022 melampaui angka PMI Manufaktur Dunia (50,3), ASEAN (53,5), Malaysia (49,1), Vietnam (52,5), dan Filipina (52,9), juga lebih tinggi dari Tiongkok (48,1), Jepang (50,8) dan Korea Selatan (47,6).

"Peningkatan PMI Manufaktur Indonesia kali ini juga disebabkan karena kemampuan industri. Hal ini antara lain adanya efisiensi karena pemanfaatan teknologi, peningkatan kemampuan SDM industri, dan kemudahan akses terhadap bahan baku," jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dilansir dari laman Kemenperin, Selasa (4/10).

Menurut Agus, PMI Manufaktur Indonesia yang kembali meningkat di bulan September 2022 menunjukkan kinerja sektor industri yang semakin membaik dan menunjukkan perkembangan yang stabil. "Dalam hal ini, aktivitas produksi berperan penting terhadap naiknya indeks, yang didukung oleh peningkatan permintaan, terutama dari

dalam negeri," ujarnya.

Agus menjelaskan, resiliensi industri manufaktur menguat dibuktikan dengan kinerja PMI naik sampai 53,7 pada September 2022. "Terjadinya rantai pasok di sektor industri tentu mendukung peningkatan pada produktivitasnya. Upaya ini terus dipacu melalui kebijakan yang strategis guna mendorong daya saing industri nasional," paparnya.

Agus menyebutkan, peningkatan produksi dapat dilihat pada industri elektronika, industri bahan galian non-logam, serta industri mesin dan perlengkapan YTDL. Di industri elektronika, kenaikan terutama terjadi pada produksi produk laptop untuk memenuhi permintaan realisasi belanja pemerintah dan pemerintah pusat yang mewajibkan pembelian Produk Dalam Negeri (PDN).

Selanjutnya, kenaikan produksi industri bahan galian non-logam yang meliputi produk semen, keramik, dan kaca dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, serta properti oleh para pembangun. "Selain itu, juga terdapat belanja pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial," jelas Agus.

S&P Global melihat adanya penurunan permintaan asing pada perusahaan-perusahaan Indonesia yang disurvei. Terkait hal itu, Agus berpendapat, penurunan ekspor terjadi karena negara-negara tujuan seperti RRT, Amerika Serikat, maupun negara-negara Eropa mengalami inflasi yang mengakibatkan tekanan terhadap ekspor beberapa produk manufaktur Indonesia. Meskipun demikian, ekspor CPO dari Indonesia sudah kembali normal setelah sebelumnya belum optimal. • **dro**